

PAD dari SP3 Menjanjikan

Yang Disetor Dishub Rp1 Miliar Lebih

PALU - Pantas saja Pemkot enggan untuk menghapus Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) yang ada di Bandara Mutiara Palu. Sebab sektor ini, termasuk pos yang menjanjikan dan cukup memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sepanjang 2010. Sayangnya jumlah pendapatan yang diterima kas Daerah diduga berbeda dengan hasil yang diperoleh di lapangan.

Dari hasil kalkulasi dan penelusuran media ini, setidaknya selama 2010, dari sektor ini Pemkot, bisa menerima pemasukan sekitar Rp1,8 miliar. Hitung-hitungan ini, didasarkan pada data rata-

rata jumlah penumpang setiap harinya di semua maskapai penerbangan, yang kemudian dikalkulasikan dengan jumlah pungutan Rp5 ribu per penumpang yang akan masuk ke ruang tunggu Bandara Mutiara Palu.

Setiap penumpang yang akan masuk ke ruang tunggu, hampir dapat dipastikan tidak ada satu pun yang bisa lolos sebelum membayar SP3

senilai Rp5 ribu. Sementara, data yang diperoleh media ini, bahwa di sepanjang 2010, jumlah penumpang seribu orang lebih dalam setiap harinya.

Jika dikalikan Rp5 ribu dengan jumlah penumpang 1.000, maka dalam sehari Pemkot bisa meraup pendapatan Rp5 juta. Dikalikan dengan 30 hari (aktivitas bandara tak pernah tutup, walaupun tanggal merah dan

libur nasional), maka diperoleh pendapatan Rp150 juta per bulan. Dalam setahun, berarti Pemkot menerima pemasukan sekitar Rp1,8 miliar.

Sementara untuk periode Januari hingga awal Juni 2011, jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Mutiara Palu, setiap harinya

► Baca PAD Hal. 6

Dishub Belum Laporkan ke DPPKAD

■ PAD ...

Sumbangan dari hal 1

rata-rata mencapai 1.800 orang dari 6 maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Mutiara Palu.

Dari data yang dimiliki Bandara Mutiara Palu, untuk Maskapai penerbangan Lion Air memiliki jadwal penerbangan dari Palu ke luar Palu tiga kali penerbangan yakni, pagi dua kali penerbangan dan siang satu kali penerbangan.

Sekali pemberangkatan Lion Air dengan kapasitas tempat duduk 213 hampir setiap hari penuh. Maskapai Garuda, jadwal penerbangannya sekali sehari yakni, sore Palu-Jakarta dengan kapasitas tempat duduk pesawatnya 185 juga rata-rata dalam sehari pemberangkatan juga penuh. Maskapai Batavia Air, dua kali penerbangan pagi dan siang, jurusan Palu-Jakarta dan Palu-Surabaya. Kapasitas tempat duduk pesawat Batavia

Air 125 penumpang sekali penerbangan dan setiap hari juga selalu penuh. Maskapai Sriwijaya Air dengan jadwal penerbangan dua kali, Palu-Kalimantan-Jakarta dan Palu-Makassar—dengan kapasitas tempat duduk 125 penumpang juga setiap harinya sering penuh. Sementara untuk pesawat penerbangan lokal, untuk pesawat Express Air jurusan Palu-Tolitoli- dan Buol jadwal penerbangan seminggu tiga kali yakni, Senin, Rabu dan Jumat setiap jadwal penerbangan juga penuh. Pesawat Express Air

dengan kapasitas tempat duduk pesawatnya 30 juga setiap kali pemberangkatan selalu penuh. Begitu juga dengan pesawat Smac dengan kapasitas 18 penumpang yang jadwal penerbangannya seminggu dua kali setiap kali pemberangkatan juga sering penuh.

“Kalau kami rata-ratakan dari Januari hingga awal Juni 2011 jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan yang beroperasi di Bandara Mutiara Palu sekitar 1.800 penumpang per hari. Biasanya yang paling banyak penumpang dan sering tidak kebagian tiket menjelang libur hari raya keagamaan,” ungkap Kepala Keselamatan Penerbangan Bandara Mutiara Palu Djarot Subiantoro kemarin.

Data mengenai jumlah setoran yang masuk selama 2010 ini, berbeda dengan nominal yang disodorkan oleh Dinas Perhubungan, yang mengaku bahwa di 2010, PAD dari item pungutan sumbangan pihak ketiga di Bandara Mutiara yang dimasukkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu ke kas daerah mencapai Rp1.022.000.000 dari target realisasi Rp928 juta atau Rp1.042.000.000 pada perubahan anggaran lalu.

Mengenai sorotan berbagai kalangan yang menilai pungutan itu ilegal, menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Hindro Surahmat, mengaku masih tetap memberlakukan pungutan kepada semua penumpang maskapai yang melalui Bandara

Mutiara.

Hindro kukuh menegaskan jika keputusannya menerapkan pungutan tersebut adalah perwujudan dari penerapan Perda nomor 17 tahun 2002 tentang sumbangan pihak ketiga yang juklaknya mengacu pada Perda nomor 42 tahun 2000. Dan terhitung Januari hingga 9 Juni 2011 ini Dishub telah berhasil memungut ratusan ribu dari karcis sumbangan yang disodorkan kepada penumpang.

“Kami masih akan menerapkan aturan yang sama terhadap semua penumpang di Bandara Mutiara. Dari pungutan Rp5 ribu per penumpang selama awal 2011 hingga tanggal 9 Juni, jumlah pungutan yang masuk ke kas Dishub berjumlah Rp421 juta,” ujar Hindro.

Jumlah ini memang belum mencapai 50 persen dari target realisasi yang ditetapkan oleh Dishub yakni sebesar Rp1 miliar atau tidak begitu beda dengan pencapaian realisasi 2010 lalu.

Hanya saja kata Hindro, pihaknya belum bisa memastikan apakah pungutan ini akan terus diberlakukan hingga akhir 2011.

“Dalam waktu dekat ini kami akan meninjau kembali penerapan pungutan di Bandara. Namun keputusannya ada pada walikota,” jelasnya.

Hindro cukup menyayangkan jika sumber PAD dari sumbangan pihak ketiga ini harus dihapuskan. Sebab kata dia sejak pungutan ini dilimpahkan kewenangannya ke Dishub, terjadi lonjakan penerimaan PAD

hingga 400 persen dari saat pungutan ini ditangani oleh Dispenda beberapa tahun lalu.

Lanjut Hindro, temuan BPK sebenarnya terletak pada penentuan besaran pungutan. Seharusnya dalam aturan disebutkan bahwa untuk sektor penerimaan yang berbentuk sumbangan, tidak dibenarkan adanya penentuan besaran nominal yang dibebankan kepada masyarakat.

“Sekarang persoalannya jika kami tidak menentukan besaran nominal pada karcis yang kami keluarkan, maka pengawasan terhadap uang riil yang masuk akan sulit untuk diawasi,” jelasnya.

Hindro menambahkan jika pihaknya memiliki bukti potongan karcis yang terbayar milik penumpang. Bukti potongan karcis kata dia sebagai bukti jumlah penumpang yang keluar melalui Bandara Mutiara dan jumlah besaran pungutan yang diperoleh oleh Dishub.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu, Suhirman, saat dikonfirmasi mengenai penerimaan kas daerah dari item sumbangan pihak ketiga di Bandara Mutiara sejak 2011 mengatakan jika pihaknya belum tahu pasti berapa jumlah realisasi yang diperoleh oleh Dishub sebab belum memasukkan dananya ke kas daerah. “Seharusnya mereka melaporkan serta memasukkan setorannya setiap bulan, namun hingga saat ini belum ada,” tandasnya. (ron/ima)